



**URGENSI PENYELESAIAN TUNGGAKAN UANG PENGGANTI
YANG DIPUTUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

LUSIANA LAMTURE

1910622038

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2021



**URGENSI PENYELESAIAN TUNGGAKAN UANG PENGGANTI
YANG DIPUTUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

LUSIANA LAMTURE

1910622038

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Lusiana Lamture

NIM : 1910622038

Tanggal : 22 Juli 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyaaannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Lusiana Lamture

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusiana Lamture

NIM : 1910622038

Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Urgensi Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Yang Diputus Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Juli 2021

Yang Menyatakan



Lusiana Lamture

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Lusiana Lamture

NRP : 1910622038

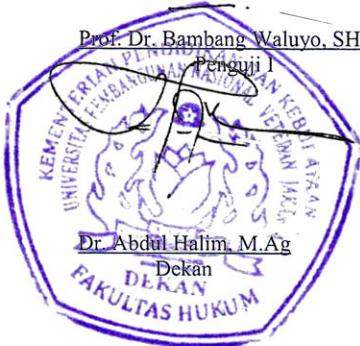
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Urgensi Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Yang
Diputus Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Jakarta.

Dr. Abdul Halim, M.Ag
Ketua Penguji

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH, MH
Penguji I



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Dr. Supardi, SH, MH
Penguji II/ Pembimbing

Dr. Beniharnoni Harefa, SH, LL
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 27 Juli 2021

ABSTRAK

Korupsi mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan negara menderita kerugian, salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyelesaian pembayaran UP oleh Kejaksaan RI dan urgensi yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Analisis data dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penyelesaian pembayaran tunggakan UP oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang diputus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 dilaksanakan melalui gugatan perdata dan tidak bisa dieksekusi, dilaksanakan dengan mencicil dan masih berjalan, hingga tunggakan yang tidak bisa diselesaikan serta melalui upaya penghapusan UP. Urgensi bagi Kejaksaan Republik Indonesia adalah banyaknya jumlah penyelesaian tunggakan uang pengganti yang belum terealisasi secara menyeluruh. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada posisi administrasi perkara yang menggantung.

Kata Kunci: Uang Pengganti, Korupsi, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971

ABSTRACT

Corruption caused the perpetrators to obtain financial advantages and losses for the country, one of the ways to restore country's lost disadvantages is by providing additional penalty in the form of replacement money. The purpose of this research is to determine the implementation of payment settlement of Replacement Money by the Attorney General of the Republic of Indonesia and the urgency faced in the implementation of the replacement money execution in the corruption crime case based on Law Number 3 of 1971. This research type is normative legal research with legal and conceptual approach. The data analysis in this thesis research is qualitative descriptive. The research results showed that the implementation of payment completion of the arrears in replacement money by the Attorney General of the Republic of Indonesia decided based on Law Number 3 of 1971 is conducted through civil lawsuit and cannot be executed is conducted in installments and still running, until the unresolved arrears and through the deletion attempt of replacement money. The urgency for the Attorney General of the Republic of Indonesia is the large number of settlements of replacement money arrears which overall has not been realized. It is feared that this will have an impact on the administration position of the pending cases.

Keywords: Replacement Money, Corruption, Law Number 3 of 1971

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan YME atas segala Rahmat dan berkatNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

Tugas Akhir yang berjudul **“Urgensi Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Yang Diputus Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”** ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan tulus memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terutama kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, AK., CPMA., CA. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, SH.,LLM. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Dr. Supardi, SH, MH selaku Dosen Pembimbing ditengah kesibukan beliau sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI namun masih dengan kesabaran tetap memberikan bimbingan, petunjuk, saran dan masukan atas tesis saya;
5. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH, MH selaku Guru Besar UPN dan sebagai Penguji I atas sidang tesis saya yang banyak memebrikan kritik dan saran atas tesis saya;
6. Bapak dan Ibu Civitas akademika, khususnya kepada Ibu Juli Orion, SH, MH dan Bapak Satino, SH serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang banyak mendukung kelancaran perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini;

7. Orang Tuaku Tercinta Bapak P. Manalu dan Ibu R. Pasaribu yang selalu mendukung secara moril dan selalu mendoakan keberhasilan anaknya;
8. Suami Tercinta Palti Silalahi, ST dan Anak-anakku, Jose dan Juan yang selalu memberikan dukungannya dan doanya;
9. Kepada teman-teman konsentrasi Hukum Pidana, khususnya kepada Ronny Bona Tua Hutagalung, SH, Arilasman Cornelius Simamora, SH, Indra Cosmas Silalahi, SH, Andi Maulana, SH, Jefri Hardi, SH, Aryaguna, SH, Narwanto, SH yang banyak memberikan masukan dan mewarnai dalam kebersamaan saat menempuh kuliah.
10. Himawan Prasetyo, SH, MH dan Agustiar Hahiri Lubis, SH yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan tugas akhir.
11. Pimpinan dan Atasan serta rekan-rekan kerja di kantor Kejaksaan Agung pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang banyak mendukung dan memberikan toleransi kepada saya selama menempuh perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 22 Juli 2021



Lusiana Lamture

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
PERNYATAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual	10
D. Metode Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	22
BAB III PENYELESAIAN UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971	27
A. Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi.....	27
B. Jaksa Pengacara Negara.....	31
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	43
A. Urgensi Kejaksaan Republik Indonesia Menyelesaikan Tunggakan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.....	43
B. Upaya Penyelesaian Uang Pengganti oleh Kejaksaan Republik Indonesia	48
C. Hasil Kerja Kejaksaan Republik Indonesia atas Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti yang Diputus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971	57
D. Kendala yang Dihadapi Kejaksaan dalam Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti yang Diputus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	66
BAB VPENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	76
RIWAYAT HIDUP	